

A.A.B. Sutedja File: Gubernur Bali Pertama dalam Lipatan Sejarah¹

Slamat Trisila*

Abstract

This paper reveals a portion of political chapter AA Bagus Sutedja of Puri Negara, a royal household in Jembrana, West Bali. Sutedja was the first governor of Bali, the provincial island officiated in 1959, which previously had been part of the Lesser Sunda Island Province. In this article we learn Sutedja's short, yet skyrocketing political career from a low-level governmental official and then built his own way to be the island first governor. His appointment as the governor was the result of then President Soekarno's political scenario in implementing the policy of the central government in Jakarta. When the 1965's political tragedy struck in Jakarta that topple the president, Sutedja suffered similar fate. The governor not only lost his position, but was tragically kidnapped and was believed to have been killed. Till these days his where-about remains a mystery in Bali's dark history.

Key words: A.A.B. Sutedja, Bali governor, political map, power, violence

* Slamat Trisila adalah peneliti independen dan Pengelola Pustaka Larasan. Kini sedang menyelesaikan S-2 pada Program Magister Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana. Hingga saat ini masih tercatat sebagai Dewan Redaksi Jurnal Sejarah *Tantular* Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Koordinator bidang Media pada Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Bali. Buku yang telah diterbitkan *Denpasar Tempo Doeloe: Melacak Dinamika Kota Denpasar Berbasis Visual* (2013). Email: puing@mail.com

1 Judul tulisan ini terinspirasi dari buku karya Antonie C.A. Dake, *Sukarno File: Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*. Jakarta: Aksara Karunia, 2006. Beberapa arsip dan dokumen penulis dapatkan atas jasa baik dari Anak Agung Gde Agung Benny Sutedja dari Puri Negara, Jembrana, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.

Pendahuluan

Periode politik tahun 1950-1965 merupakan rentang waktu yang singkat, namun sarat dengan dinamika di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Indonesia, termasuk di Bali. Beberapa kajian telah menyoroti berbagai peristiwa yang terjadi pada periode tahun 1950-1965. Salah satunya adalah tulisan Adrian Vickers yang menguak periode tahun 1950-an sebagai tahun-tahun yang krusial dalam sejarah Indonesia. Vickers dalam tulisannya yang berjudul "Mengapa tahun 1950-an penting bagi kajian Indonesia" menggarisbawahi periode tersebut sebagai berikut.

Dalam historiografi nasional Indonesia, tahun 1950-an selalu menonjol sebagai periode yang tidak dapat dimasukkan ke mana-mana dalam kisah jelas tentang apa yang terjadi setelah itu.

Sementara banyak lagi hal-hal lain yang menyita perhatian para sejarawan Indonesia sejak 1998 –terutama perdebatan mengenai peristiwa 1965 dan akibat-akibatnya, sehingga tahun 1950-an tetap merupakan sebuah masalah karena menyangkut persoalan-persoalan sensitif mengenai, seperti bagaimana negara dan bangsa Indonesia terbentuk, hakikat masyarakat Indonesia yang sangat berbeda pada era itu, dan persoalan-persoalan kelas dan sosialisme, yang tidak umum dibicarakan. Di lain pihak, para sejarawan asing juga sama, tidak mempedulikan periode ini, kadang-kadang karena alasan-alasan yang senada dengan alasan-alasan yang diberikan sejarawan Indonesia (Vickers 2008: 67-68).

Tulisan Vickers tidak meninggalkan suatu kesimpulan, tetapi menarik untuk dicatat bahwa periode 1950-an terkait dengan penguasa setelah terjadinya peristiwa 1965 sehingga kita kehilangan benang merah dari apa yang dibangun oleh tokoh-tokoh dan gerakan pada periode tersebut yang belum mewujud.

Pergolakan lokal yang dimotori oleh Pemuda Pejuang Bali pada tahun 1950-an telah dibahas oleh I Gusti Ngurah Bagus (1991: 199-212). Peranan Pemuda Pejuang pascakemerdekaan sangat penting, selain jasa-jasanya menghalau NICA-Belanda hadir kembali ke Bali yang menyulut Perang Kemerdekaan juga menyuplai tokoh-tokoh politik di pemerintahan yang baru

terbentuk yang memosisikan Bali sebagai bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Puncak pergolakan di kalangan Pemuda Pejuang ditandai dengan terjadinya polarisasi pilihan politik masing-masing dari mereka pada pemilu tahun 1955 dan pemilihan Gubernur Bali yang pertama tahun 1958 setelah berdiri sebagai provinsi.

Periode 1950-1965 di Bali dalam konteks politik kebudayaan dengan fokus konflik Lembaga Kesenian Nasional (LKN) yang berada di bawah naungan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sebagai organisasi underbow Partai Komunis Indonesia (PKI) diulas lugas oleh Darma Putra (2008: 67-81). Dalam tulisan yang lain yang bertajuk "Mulai berbentuk; Budaya dan nasionalisme di Bali 1959-1965," Drama Putra mengulas kembali persaingan merebut dominasi dalam setiap kegiatan politik kebudayaan di Bali antara LKN dan Lekra dalam tensi yang sangat tinggi (Darma Putra 2011: 347-376). Sudah menjadi rahasia umum pada tahun 1960-an, bahwa Soekarno punya hubungan dekat dengan PKI dan LEKRA sehingga ketika menjalankan proyek nasional 'Nasakomisasi' dalam praktiknya menyiratkan infiltrasi PKI dalam aktivitas politik dan budaya.

Di tingkat nasional, pemerintah memberikan keistimewaan kepada anggota-anggota LEKRA, termasuk meluangkan kesempatan lebih banyak sebagai peserta dalam program pertukaran kebudayaan dan misi kesenian ke luar negeri, dan Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Sutedja juga memberikan dukungan lebih kepada anggota PKI dan LEKRA dibandingkan yang diberikan kepada kelompok nasionalis, sehingga memperparah ketidakseimbangan politik yang sudah terjadi. Bukti untuk hal ini, dalam konteks aktivitas budaya, adalah ketika Gubernur Bali mendukung penunjukan anggota-anggota PKI dan LEKRA sebagai panitia lokal untuk pertemuan eksekutif penulis-penulis Asia-Afrika di Bali 1963, sedangkan sayap nasionalis, yang termasuk sebagai salah satu bagian dari NASAKOM, disisihkan. Lagi pula, Gubernur Bali sering meminta kepada anggota-anggota LEKRA untuk menyiapkan spanduk dan poster untuk acara-acara atau perayaan

yang bersifat nasional, sesuatu yang membuat anggota-anggota LKN merasa terpinggirkan dan membuat mereka menuduh pemerintah berlaku tidak adil kepada unsur-unsur NASAKOM (Darma Putra 2011: 360).

Selain terjadinya persaingan antara LKN dan Lekra yang menjadi titik tolak pembahasan, Darma Putra juga menyisipkan "catatan kaki" mengenai Anak Agung Bagus Sutedja (1923-66?), Gubernur Bali yang pertama hilang dan diduga dibunuh dalam pembantaian pasca-Oktober 1965 (Darma Putra 2011: 347-376).

Pertarungan ideologi pada level nasional ketika merambah ke Bali ditandai dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional, seperti Nyoto dari PKI, Proamoedya Ananta Toer dari Lekra, dan Sitor Situmorang dari LKN ke Bali yang terafiliasi pada salah satu partai dan menggusung jargon-jargon partainya sehingga memanasakan suhu politik lokal.

Beberapa kajian mengenai peritiswa tragedi 1965 di Bali, telah dilakukan oleh Geoffrey Robinson (1995 [2006]), Lesley dan Degung Santikarma (2007), dan Suryawan (2007). Sementara tulisan-tulisan yang menyinggung tentang tragedi 1965 di Bali dikumpulkan dalam sebuah buku, antara lain Ardhana dan Wirawan (2012), Robert Cribb (2007), Stevan Eklof (2007), dan Tjong (2004)

Dari beberapa kajian tersebut belum ada yang menyentuh secara lebih rinci mengenai misteri hilangnya Gubernur Sutedja yang tidak terlepas dari eksekusinya ketika menjadi orang nomor satu di Bali yang Soekarno. Hilangnya Gubernur Sutedja menimbulkan spekulasi dan dugaan, yang cenderung mistifikasi di sebagian masyarakat Bali. Banyak dugaan bahwa Anak Agung Bagus Sutedja diduga dibunuh dalam peristiwa pasca-Oktober 1965 di Bali. Apakah benar Anak Agung Bagus Sutedja dibunuh? Pertanyaan yang muncul kemudian, di mana dan oleh siapa Anak Agung Bagus Sutedja dibunuh? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar mengingat sampai hari ini belum ditemukan jasadnya dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus

ini. Untuk mengungkap tabir hilangnya Anak Agung Bagus Sutedja, beberapa hal yang menjadi pertanyaan, (1) siapa sosok Anak Agung Bagus Sutedja; (2) bagaimana peristiwa hilangnya Gubernur Bali pertama itu, (3) dan mengapa Anak Agung Bagus Sutedja harus dilenyapkan?

Serpihan Sejarah Bali Pasca-Kemerdekaan

Sejak masa Perang Kemerdekaan, di Bali telah muncul perselisihan di antara pejuang revolusioner didukung oleh kelompok intelektual yang berpusat Singaraja dengan penganut konservatif dari kalangan bangsawan kerajaan. Kembalinya Belanda di belakang kekuatan NICA pada saat konflik di Bali disambut oleh sebagian besar para raja. Sikap pro-Belanda ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsawan Bali; banyak dari kalangan mudanya mendukung peralihan pemerintahan Republik di Bali.

Selama tahun 1945 hingga 1950-an, Bali tidak berada di bawah satu kekuasaan pusat, karena setiap kerajaan berusaha membangkitkan kembali arti pentingnya peranan puri mereka, pada sisi lain administrasi Republik yang sifatnya sementara berjuang untuk memperoleh pengakuan, baik dari dalam maupun luar Bali. Para raja berjuang untuk kepentingannya dalam konflik kelompok apakah mengikuti Republik atau tetap pro-Belanda. Bahkan dalam internal keluarga kerajaan juga timbul perpecahan mengikuti garis pro-kontra. Misalnya, Dewa Agung muncul sebagai seorang pemimpin yang paling setia pro-Belanda, dengan mekanisme kuat atas pengawasan dalam kerajaannya Klungkung. Ironinya justru salah seorang puteranya, Cokorda Anom Putera, menjadi Republikan.² Pembentukan Negara Indonesia Timur

2 Pasukan NICA terdapat kesatuan resimen Gajah Merah yang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri F.H. ter Muelen. NICA mendarat di pantai Sanur pada tanggal 2 Maret 1946 dan langsung menduduki Denpasar, kemudian berturut-turut menguasai Gianyar tanggal 3 Maret 1946, Singaraja tanggal 5 Maret 1946, Tabanan tanggal 7 Maret 1946, dan Jembrana tanggal 19 Maret 1946. Salah satu contoh dukungan atas kehadiran Belanda, yakni sambutan dari Raja Gianyar dan pasukan pendukungnya yakni Pemuda Pembela Negara (PPN). Di Jembrana NICA dibantu para pemuda yang tergabung dalam Badan Pemberantas Pengacau (BPP). Tenaga mereka sangat

(NIT) melalui proses yang panjang dari tindak lanjut perjanjian Linggarjati menuju Konferensi Malino Juli 1946 hingga pengabsahannya oleh Van Mook dibawah restu Belanda di Konferensi Denpasar pada Desember 1946 yang mengangkat Cokorda Raka Sukawati sebagai Presiden dan Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Dalam Negeri.³ Ketika terjadi perubahan kabinet pada tahun 1947, Anak Agung Gde Agung ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan merangkap Menteri Dalam Negeri NIT (Manafe 2007: 160). Keputusan ini menggiring kekuasaan politik dan kekuatan masyarakat Bali semakin terbelah.

Pada tanggal 14 April 1946 dalam pertemuan gabungan dari berbagai kekuatan anti-Belanda yang diadakan di suatu daerah pedalaman di Tabanan berhasil dibentuk Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda-Kecil (MBU DPRI SK) dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Ngurah Rai dan pengikutnya melancarkan sejumlah perlawanan terhadap Belanda yang berpuncak pada *Puputan* di kawasan Marga. Sepeninggalnya Ngurah Rai, di antara para pejuang masih terjadi perbedaan pandangan mengenai kelanjutan Perang Kemerdekaan di Bali. Ida Bagus Tantra dan kawan-kawan mendirikan Markas Besar Istimewa Soenda Ketjil (MBI SK) melanjutkan perlawanan, sedangkan Widjakusuma dan sebagian besar anggota MBU SK memilih menyerahkan diri.⁴ Bahkan konflik kronis dalam revolusi

efektif untuk menyerang atau melumpuhkan pejuang-pejuang Bali yang menentang kembalinya Belanda. Mengenai perjuangan perang kemerdekaan di Bali, lihat Nyoman S. 1979:140-146; Vickers, , 2012: 223-224.

- 3 Peranan Ide Anak Agung Gde Agung dalam revolusi cukup rumit karena semula anggota Parlemen NIT dan melepas tahtanya sebagai Raja Gianyar pada saat diangkat menjadi Perdana Menteri NIT. Sementara itu Ide Anak Agung Gde Agung adalah inisiator konferensi negara-negara buatan Belanda pada tanggal 28-17 Juli 1948 di Bandung, salah satu butir yang disodorkan sangat mengejutkan pemerintah Belanda, yakni pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), artinya Belanda harus kembali ke meja perundingan dan meruntuhkan NIT, lihat Nyoman S. Pendit (1979: 228-237, 272); Aco Manafe. *Ide Anak Agung Gde Agung: Keunggulan Diplomasinya Membela Republik*. (Jakarta: Inti lipo Indah, 2007), hlm. 132-134. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa terutama dalam bidang diplomasi pemerintah menganugerahkan Pahlawan Nasional kepada Ide Anak Agung Gde Agung, berdasarkan Keppres Nomor 066/TK/2007, *Balipost, Jumat Wage, 23 November 2007*.
- 4 Nyoman S. Pendit (1979). Lihat juga I Gusti Ngurah Bagus, "Bali in 1950's: The

di Bali yang belum tuntas ini berbuntut sampai tahun 1950-an.

Perpecahan antara kekuatan pro-kolonial vs republikan dalam masyarakat Bali, yang mengeras selama Perang Kemerdekaan, menyisakan luka yang tidak tersembuhkan hingga memperoleh pengakuan kedaulatan pada akhir 1949. Estimasi kedudukan yang diperoleh selama revolusi menjadi dasar konflik politik dalam tahun-tahun awal Republik terus terakumulasi. Dengan kemenangan kelompok Republikan, mereka yang berada pada posisi terkuat secara politik adalah para pejuang Perang Kemerdekaan. Salah satu para pejuang yang aktif dalam politik adalah Anak Agung Bagus Sutedja, seorang anggota keluarga Kerajaan Jembrana di Bali barat. Sutedja representasi dari kalangan pejuang yang mempunyai semangat revolusioner, dengan kata lain sebagai pemimpin dari mereka yang menghendaki perjuangan tetap berlanjut setelah Perjanjian Meja Bundar dengan Belanda tahun 1949.

Karier Politik Sutedja

A.A.B. Sutedja adalah putra tunggal Raja Jembrana VII yang lahir tanggal 13 Januari 1923 di Mendoyo dan dibesarkan di lingkungan Puri Agung Negara, Jembrana. Sebagai anak kaum ningrat, Sutedja dapat kesempatan mengenyam pendidikan hingga tingkat atas di Surabaya pada masa kolonial. Pada masa pendudukan Jepang di Bali, Sutedja masuk dalam barisan *Heiho*.⁵

Pascaproklamasi, Sutedja membangun karier politiknya sebagai punggawa di distrik Mendoyo, Jembrana sejak bulan Mei 1946.⁶ Ketika tekanan Belanda semakin menghebat terhadap republik, dia memilih mengangkat senjata dan bergabung dengan para pemuda pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok sayap perjuang-

Role of the Pemuda Pejuang in Balinese Political Processes,” dalam Hildred Geertz (ed.), *State and Society in Bali* (Leiden: KITLV Press, 1991). hlm. 200-201.

5 Wawancara dengan Anak Agung Istri Ngurah Sutedja.

6 Koetipan Beslit Radja Djembrana No. 22/1946. tentang pengangkatan Anak Agoeng Bagoes Soetedja sebagai punggawa Mendoyo, tanggal 24 Mei 1946. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.

gan yang tidak puas dengan penanganan pemerintah terhadap bekas mata-mata Belanda menyebabkan situasi keamanan yang tidak kondusif, sehingga kehidupan masyarakat menjadi resah. Untuk menentramkan keadaan di Bali akibat kekacauan itu, Sutedja bersama 12 (dua belas) orang putra daerah dipanggil oleh Presiden Sukarno untuk membicarakan masalah keamanan di Bali. Kunjungan Sutedja dan dua belas pemuda Bali ke Istana Negara di Jakarta tepatnya pada tanggal 31 Desember 1951 juga dimanfaatkan sebagai kendaraan politik A.A.B. Sutedja menuju konstelasi lokal dengan pusat.⁷



Foto 1. A.A.B. Sutedja

Putaran pemilu tahun 1955 di Bali, yang sedianya dilakukan pada tanggal 29 September 1955 ditunda dua hari karena bertepatan dengan hari raya Galungan yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu. Berdasarkan hasil perhitungan suara tampak bahwa persaingan yang ketat dalam perolehan suara terjadi antara PNI dengan PSI disusul oleh PKI di posisi ketiga. Tiga partai lain yang memperoleh dukungan cukup besar dari masyarakat, yakni Masyumi, PRI, dan Biro Pancasila. Meskipun parlemen diwarnai oleh mayoritas anggota PNI, tetapi A.A.B. Sutedja dan pendukungnya telah berada di garda depan pergerakan untuk bisa menyisihkan semua kekuatan yang tersisa dalam Dewan Raja. A.A.B. Sutedja tidak tergabung dalam salah satu partai politik, namun dukungan mengalir dari KPNI (Komite Pemuda Nasional Indonesia) dan golongan veteran. Cokorda Anom dari Puri Klungkung mendapat suara mayoritas dan mengalahkan A.A.B. Sutedja dalam parlemen sementara Bali. Parlemen saat itu dikuasai oleh pendukung Cokorda Anom dari Partai Nasional.

7 A.A.G.A. Sutedja, "Rekonsiliasi Terapan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Gubernur Bali Anak Agung Bagus Sutedja", Makalah Seminar Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Sejati, tanggal 15 April 2004 di Universitas Udayana Denpasar.

Sukarno tidak menghendaki naiknya Cokorda Anom. Akhirnya dari dua kandidat yang diajukan ke pusat, Sukarno menggunakan hak prerogatifnya memilih A.A.B. Sutedja menjadi Kepala Daerah Bali Provinsi Nusa Tenggara sejak tanggal 17 Oktober 1950.⁸

Situasi politik di Bali memanas kembali ketika pada tahun 1958, kebijakan pemerintah pusat mengenai pemekaran Provinsi Nusa Tenggara yang menetapkan Bali sebagai provinsi (Robinson 1995). Dengan pembentukan Bali sebagai provinsi baru disusul dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur. Dalam pemilihan di parlemen daerah mayoritas memilih Nyoman Mantik, seorang nasionalis dengan dukungan kelompok sayap kanan sebagai gubernur. Nama Nyoman Mantik dan A.A.B. Sutedja muncul sebagai kandidat kuat dalam bursa pemilihan gubernur. Lagi-lagi Sukarno, mengintervensi pemilihan gubernur dan mengangkat A.A.B. Sutedja sebagai Gubernur Provinsi Bali yang pertama dan dilantik pada tanggal 5 Desember 1959 (lihat foto 2).⁹ Bagi Sukarno, pilihannya adalah antara kekuatan konservatif dan kelompok radikal, yang diwakili A.A.B. Sutedja, yang mendukung cita-cita Sukarno dalam melanjutkan revolusi.

Pada peta politik nasional, A.A.B. Sutedja diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI sejak Desember 1959 dan secara *ex-officio* menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kedekatannya dengan pemerintah pusat, membawanya dipercaya sebagai anggota Front Nasional dan sekaligus ketua Front Nasional daerah Bali tahun 1962. Selain tercatat sebagai anggota veteran golongan A, jabatan lain yang disandangnya, antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat "Gotong Royong" Provinsi Bali sejak tahun 1960 dan Penguasa Pelaksana Daerah ketika Dwikora dicanangkan pada tahun 1961.¹⁰

8 I Gusti Ngurah Bagus, dalam Hildred Geertz (ed.), *State and Society in Bali* (Leiden: KITLV Press, 1991) hlm. 205, Apendiks tabel hasil Pemilu tahun 1955.

9 Adrian Vickers, (2012:225). Wawancara dengan Ida Bagus Sutha. Bagi Sukarno, A.A.B. Sutedja adalah seorang putra terbaik dari Pulau Bali. Lihat "Perkembangan Party Politik Mendjelang Pemilu 1955" dalam Catatan Harian I Wayan Reken (belum dipublikasikan), hlm. 22-23.

10 Dukungan PKI terhadap sektor ekonomi dan penerapan *land reform* di Bali menda-



Foto 2. Pelantikan A.A.B. Sutedja sebagai Gubernur Bali pertama tanggal 5 Desember 1959 (Sumber: Arsip ANRI, kempen Bali 591205 MM1-6)

Dengan posisi ini, Gubernur A.A.B. Sutedja menjadi penguasa yang berpengaruh luas kalau tidak dikatakan berkuasa mutlak di Provinsi Bali.

Semua titel dan kedudukan atau jabatan yang disandangnya menjadi ironi ketika pada penghujung karier politiknya, karena A.A.B. Sutedja dituding atas berbagai macam keteledoran dan penyalahgunaan wewenang oleh musuh-musuhnya yang kembali berkibar di panggung politik.

Politik Kekerasan

Sejak pascapemilu tahun 1955 perkembangan perpolitikan sangat dinamis, baik secara nasional maupun di daerah-daerah termasuk di Bali. Hal ini ditandai dengan peningkatan keanggotaan PKI yang luar biasa di Bali. Dukungan mengalir ke PKI, selain PKI sebagai bagian dari program politik Presiden Sukarno, yakni

pat sambutan yang cukup luas, lihat Geoffrey Robinson, (1995: 243-280). Film Dokumenter "Kawan Tiba Senja: Bali sekitar 65". Produksi LPKP Bali dan JK6 Bali, 2004. Pratragedi '65 massa PNI dan PKI sudah mengalami konflik di tingkat bawah, bahkan terdapat antarkeluarga di Gianyar yang saling melakukan tindak kekerasan, wawancara dengan I.B. Sidemen.

menggalang kekuatan Nasakom (nasional, agama, dan komunis), juga mengenai kebijakan *landreform* yang menguntungkan gerakan PKI. Melalui *landreform* ini, para petani miskin termediasi dalam menuntut pembagian lahan dari para tuan tanah yang menguasai tanah-tanah pertanian. Agitasi yang terus-menerus dilancarkan oleh PKI mengakibatkan peningkatan ketegangan sosial di Bali. Pada 1964 ketika Bali mengalami kemerosotan ekonomi karena dampak meletusnya Gunung Agung, banyak dari orang-orang tidak punya tanah merasa mendapat keringanan melalui kebijakan pembagian yang lebih merata atas kepemilikan lahan. Kondisi ini berlangsung hingga 1965, dan implikasinya Bali merupakan salah satu daerah yang basis PKI-nya cukup kuat, terutama di daerah Buleleng, Jembrana, Badung, dan Gianyar (Robinson 1995: 243-272).

Pada awal 1960-an suhu politik di Bali semakin meninggi dan kesehariannya di tengah-tengah masyarakat tidak pernah sepi dari konflik dan dari arak-arakan terus mengalir di jalanan. Polarisasi politik semakin menajam antara PNI *vis-a-vis* PKI setelah PSI dan Masyumi dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Masyarakat yang terpancing oleh isu-isu semakin tergiring ke arena politik sehingga mempertajam perpecahan antara PNI dan PKI. Perpecahan tersebut dilatarbelakangi salah satu unsurnya masih terkait dengan kasta dan tatanan feodal. Meski masyarakat Bali terpolarisasi dalam kasta sehingga secara garis besar terdapat dua golongan, yakni *triwangsa* (anggota dari ketiga kasta atas) dan *sudra* (anggota dari masyarakat kebanyakan). Akan tetapi, secara politis pemisahan sistem sosial tersebut tidak sepenuhnya mengikuti garis kasta. Banyak kaum intelektual dari kelompok bangsawan atau bahkan kaum brahmana menjadi anggota PKI atau simpatisannya dengan tujuan bisa mencapai kesamaan sosial yang lebih besar. PNI menjawabnya dengan kegiatan yang berbasis desa yang dirancang untuk menciptakan kader anti-PKI, yang mengarah pada serangan langsung pada kelompok kiri. Pada tahun 1960-an hampir semua partai sering menyelenggarakan pertemuan publik dan meningkatkan tekanan pada semua

anggota masyarakat agar terlibat dalam politik.

Pada 30 September 1965 perebutan kekuasaan atau kudeta terjadi di Ibu kota Jakarta dengan ditandai penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal. Pada tanggal 1 Oktober 1965 Mayjen Suharto dengan dukungan Angkatan Darat mengadakan operasi militer dan berhasil mengambil kendali ibu kota. Bahkan dalam siaran pers melalui radio dan media cetak, pihak Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalang pembunuhan para jenderal. Isu kekejaman PKI dalam aksinya membunuh para jenderal di Lubang Buaya juga disebarluaskan melalui media massa terutama harian *Angkatan Bersenjata* dan diekspose secara besar-besaran. Dalam beberapa minggu teror massa menuai hasil, api penghancuran yang perlahan meluas terjadi di seluruh Jawa. Setelah kegiatan PKI yang malang-melintang dari desa ke kota dalam berbagai aksi sebelum tragedi '65, kini giliran PNI dan kelompok anti-komunis mengambil wewenang serta inisiatif melakukan gerakan sistematis penghancuran PKI dan ormas-ormasnya.¹¹

Tersiarnya pengumuman dari RRI mengenai isu Dewan Jenderal dan Gerakan 30 September di Jakarta dibawah pimpinan Letkol Untung, disikapi oleh Gubernur A.A.B. Sutedja dengan segera mengadakan rapat Pepelrada, namun rapat dadakan itu tidak menghasilkan butir keputusan yang menanggapi peristiwa yang terjadi di Jakarta. Kelompok nasionalis tidak sabar menunggu keputusan pemerintah daerah dalam menyikapi tragedi '65. Setelah dikonfirmasi oleh pihak militer (Angkatan Darat) bahwa PKI berada di belakang G30-S, orang-orang PNI Bali mendesak untuk membubarkan PKI. Gubernur A.A.B. Sutedja belum juga mengambil tindakan apa-apa karena Presiden Sukarno memerintahkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang Gestok (versi Bung Karno: gerakan satu Oktober, lihat Setiawan, 2003: 99-100; Anderson dan McVey, 2001) yang melebihi atau mendahului pernyataan resmi dari pemerintah pusat. Sikap yang terkesan hati-hati dan menjurus anggapan melindungi "orang-orang kiri" ini, juga mendapat dukungan dari Pangdam

11 Wawancara dengan I.B. Sidemen.

Udayana, Brigjen Syafiudin.

Tokoh-tokoh PNI semakin berani mengeluarkan sikap keras mengancam seterusnya (PKI) dalam pertemuan-pertemuan terbuka. Dalam upacara hari sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1965, I Gusti Putu Merta selaku ketua PNI Bali menuntut kepada Presiden Sukarno agar menekan Gubernur A.A.B. Sutedja untuk membersihkan aparat pemerintah daerah dari unsur-unsur komunis dan anasir kontrarevolusi. Di Singaraja, para tokoh PNI tidak melarang massanya pada saat melakukan aksi penjarahan barang-barang milik orang-orang PKI dan orang-orang Cina serta menggunakan tindakan kekerasan yang menciderai pihak "musuh" (Cribb 2003:417; Gie 1999). Demontrasi anti-PKI dan tindakan kekerasan terhadap orang-orang PKI semakin gencar dilakukan oleh PNI dan ormas-ormasnya serta barisan "sakit hati" dari orang-orang bekas PSI dan Masyumi.

Gelombang desakan yang mendes kreditkan PKI dan ormas-ormasnya semakin menguat, sehingga memaksa Gubernur A.A.B. Sutedja menandatangani hasil rapat Pepelrada pada tanggal 3 November 1965 pukul 22.00. Isi pokok yang diputuskan adalah membekukan untuk sementara dari segala kegiatan PKI dan ormas-ormasnya dan pelaksanaan serta pengawasannya diserahkan kepada Pangdam XV Udayana.¹² Sebagian massa di daerah tidak sabar menunggu keputusan pemerintah, bahkan ada yang mendahului melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang PKI. Terutama daerah-daerah yang terjadi konflik laten antara PNI dan PKI sebelum meletus peristiwa G30-S, seperti di Badung, Gianyar, Singaraja, dan Jembrana.

Di Jembrana, rumah pribadi Gubernur A.A.B. Sutedja, Puri Agung Negara pada tanggal 2 Desember 1965 diserang, dirusak, dan barang-barangnya dijarah oleh massa. Enam anggota keluarga dari puri diculik dan dihabisi massa, termasuk A.A.N. Denia seorang ketua Pemuda Rakyat Jembrana tewas setelah dianiaya.

12 Surat Keputusan PepelradaNo.: KEP-PPD.2/1/234 tentang pembekuan sementara PKI dan ormas-ormasnya dan pelimpahan pelaksanaan kepada Pangdam XV Bali. Tanggal 3 November 1965. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.

Keadaan di sekitar Puri Negara mereda setelah Pangdam Udayana Brigjen Syafiudin memerintahkan anak buahnya untuk menjaga puri dan sekitarnya. Peristiwa berdarah di Jembrana terkait dengan pembalasan seorang anggota militer yang terbunuh sebelumnya sehingga aksi massa yang bergerak menuding Pemuda Rakyat sebagai palukunya. Daerah Jembrana merupakan ladang pembantaian terhadap orang-orang PKI menyumbangkan angka korban yang mengejutkan karena jumlahnya besar, sekitar 6.000 orang tewas terbantai.¹³

Pembunuhan atau pembantaian berlangsung di Bali kisaran bulan Oktober 1965 hingga Februari 1966. Peristiwanya terjadi di Bali bagian utara dan barat, tempat terkuat kelompok Kiri, namun pada akhirnya seluruh Bali menjadi pemandangan daerah yang dihancurkan dengan seluruh desa dibakar rata tanah, dan pekuburan tidak mampu menampung jumlah mayat. Hingga Februari 1966, penjara menjadi penuh dan setiap malam pemuda berpakaian hitam atau *Tameng* (milisi yang dibentuk oleh PNI dan didukung oleh militer) ditarget mengisi truk militer dengan lebih banyak orang untuk dieksekusi di kuburan (setra), pinggir jurang, dan pantai. Kalkulasi “resmi” dan tidak resmi menyebutkan angka sekitar 80.000 hingga 100.000 orang terbunuh selama peristiwa ‘65-‘66 di Bali (Cribb 2003:418).

Militer dalam operasinya sejauh mungkin cuci tangan atas pembunuhan secara langsung. Mereka hanya mendatangi setiap desa dan mengeluarkan daftar orang komunis yang akan dibunuh yang diserahkan kepada kepala desa untuk mengaturnya. Dalam kebanyakan hal penduduk desa melaksanakan ‘perintah’ terselubung ini karena mereka mengetahui bila tidak dilakukan,

13 Mengenai peristiwa pembunuhan massal di sekitar Jembrana, lihat I.B. Jelantik dan Arya Suarja (ed.). *Ida Bagus Dosther 80th*. (Denpasar: Manawa Bali, 2007), hlm. 127-152; I Ngurah Suryawan, *Jejak-jejak Manusia Merah: Siasat Politik Kebudayaan Bali* (Yogyakarta: Buku Baik, 2005), hlm. 149-187; I Ngurah Suryawan, *Ladang hitam di Pulau Dewa: pembantaian massal 1965 di Bali* (Yogyakarta: Galangpress, 2007). Di sekitar Mengwi dan Blahkiuh juga terjadi pembunuhan terhadap orang-orang PKI pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966. Lihat Henk SchulteNordholt, *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. (Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV Jakarta, 2009).



Foto 3. Apel Siaga Kebulatan tekad dan taat kepada Presiden Sukarno di Lapangan (Puputan) Badung, Denpasar, 26 Februari 1966 (Sumber: Arsip ANRI, Kempen Bali 660226 MM-1-3b)

mereka akan dituduh sebagai simpatisan komunis dan risiko terberatnya dibunuh. Pola pengambilan korban merujuk sistem silang antardesa atau *banjar* dan di tingkat operasional peranan satgas PNI “*Tameng*” sangat efektif melancarkan implementasi proses pengambilan sampai membunuh korban.¹⁴ Dalam satu atau dua kasus seluruh *banjar* menolak memberi izin kepada kelompok pembunuh desa masuk, namun ini merupakan perkecualian yang jarang sekali.

Presiden Sukarno segera memanggil Gubernur A.A.B. Sutedja ke Jakarta pada saat puncak kegentingan di Bali. Melalui memo yang disampaikan ke Gubernur A.A.B. Sutedja, pemanggilan pertama pada tanggal 10 Desember 1965 untuk membicarakan kekacauan di Bali. Hasil pembicaraan antara Gubernur A.A.B.

14 Wawancara dengan Nengah Seria (60), Denpasar; hasil penelitian dari LIPI tentang G30S di Bali, cuplikan wawancara dengan Prof. Dr.Phil. I Ketut Ardana, M.A. dalam Film Dokumenter “Kawan Tiba Senja: Bali seputar ‘65” produksi LPKP ‘65 Bali dengan JK6. Lihat I Ketut Ardhana dan A.A. Bagus Wirawan, “Neraka Dunia di Pulau Dewata,” dalam Taufik Abdullah, Sukri Abdurrahman, dan Restu Gunawan. *Malam bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik lokal*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2012), hlm. 360-441; Slamet Trisila. “Dewa Ngurah Jenawi: Pendidikan dan Pelajaran,” dalam Haryo Sasongko dan melani Budianta (ed.), *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965*. Jakarta: Yayasan Lontar, 2003.

Sutedja dan Presiden Sukarno menyepakati, antara lain.

- 1). A.A.B. Sutedja tetap menjadi Gubernur Bali;
- 2). Karena keadaan di Bali membahayakan, maka untuk sementara (selama 1-3 bulan) A.A.B. Sutedja dan keluarga tinggal di Jakarta;
- 3). Untuk *caretaker* ditunjuk salah seorang pejabat gubernur;
- 4). Ditunjuk atau dipilih seorang wakil gubernur yang tetap.¹⁵

Pada suatu kesempatan di hadapan Sabur, Sumarno, Chaerul Shaleh, dan Syafiudin, Sutedja ditanya oleh Bung Karno apakah dia PKI, yang dijawab A.A.B. Sutedja bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah belaka. Bung Karno meyakinkan A.A.B. Sutedja bahwa dia harus tetap memangku jabatannya.¹⁶

Dalam menindaklanjuti hasil pertemuan, pada tanggal 18 Desember 1965 dikeluarkan Keppres No. 380 tahun 1965 yang menetapkan: penugasan sementara A.A.B. Sutedja ke Jakarta, menunjuk I Gusti Putu Merta sebagai Pjs. Gubernur Bali dan I Gusti Ngurah Pindha sebagai wakil Gubernur Bali.¹⁷

Setelah serah terima jabatan sebagai Gubernur Bali, A.A.B. Sutedja menjalani tugas barunya di lingkungan Departemen Dalam Negeri sehingga istri dan anak-anaknya (berikut keponakan) diboyong ke Jakarta. Di Jakarta keluarga A.A.B. Sutedja menempati rumah dinas di Jalan Renang No. 261 di sekitar senayan dengan izin resmi menempati rumah yang dikeluarkan oleh Depdagri. Menurut penuturan istri Sutedja selama mendampingi sang suami bertugas di Jakarta semuanya berjalan seperti biasa dan tidak terjadi kejanggalan, seperti adanya teror terhadap keluarga.

Pada tanggal 29 Juli 1966, tepatnya hari Jumat pukul 08.30, Sutedja dijemput oleh 4 orang berseragam militer yang membawa perintah dari atasannya Kapten Teddy dari Skogar (Satuan Komando Garnisun). Tanpa rasa curiga, A.A.B. Sutedja hanya menanyakan "ada apa?" dan dijawab oleh salah seorang yang berpangkat Sersan satu, "Bapak disuruh datang oleh

15 Memo Sekretariat Negara Kabinet Presiden. Mengenai Pemanggilan Gubernur A.A.B. Sutedja ke Jakarta. Tanggal 3 Desember 1965. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.

16 Wawancara dengan Anak Agung Gde Agung Sutedja (anak tertua A.A.B. Sutedja)

17 Petikan Keputusan Presiden RI No. 380/1965, tentang penugasan sementara A.A.B. Sutedja ke Jakarta, tanggal 18 Desember 1965. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.

Kapten Teddy ke Skogar di Jalan Perwira". Dengan memakai kendaraan Jeep warna abu-abu berplat nomor 04-88145 (plat hitam tulisan putih), A.A.B. Sutedja mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh mereka. Beberapa waktu berselang Istri Sutedja memerintahkan putrinya Ainy dan Tutty untuk memberitahukan peristiwa itu kepada kakaknya tertua Anak Agung Bagus Benny Sutedja yang bekerja di kantor PN Pertamina (nama Pertamina sebelum tahun 1971), serta kakak yang lain Anak Agung Made Agung, Anak Agung Bagus Surakusuma, dan Anak Agung Gede Andika di Perguruan Cikini. Anak Agung Bagus Surakusuma dan Anak Agung Gede Andika mengambil langkah awal untuk mengecek keberadaan ayahnya di Skogar, kemudian ke Kodim 003 dan terakhir ke Pepelrada Jakarta. Usaha mereka melacak keberadaan ayahnya sia-sia belaka, bahkan dalam pernyataannya masing-masing instansi itu tidak mengeluarkan perintah untuk memanggil A.A.B. Sutedja. Malangnya, nama Kapten Teddy dan plat nomer kendaraan yang dipakai adalah fiktif.¹⁸

Anak-anak Sutedja terus-menerus melakukan pencarian dan klarifikasi atas peristiwa penculikan ayahnya. Hingga diusir dari rumah dinas di kompleks Senayan, keluarga Sutedja tidak pernah mendapat penjelasan dari pihak Depdagri dimana institusi A.A.B. Sutedja bernaung juga dari pihak berwajib (kepolisian).¹⁹

Peristiwa penangkapan terhadap orang-orang Sukarno gencar dilakukan oleh Soeharto sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban setelah dikeluarkannya Supersemar tahun 1966. Tindakan Soeharto dengan kekuatan militer di belakangnya dengan mudah mengampulasi orang-orang kepercayaan Presiden Sukarno. Dirombaknya keanggotaan DPRGR dan MPRS serta penangkapan terhadap menteri-menteri yang selama Presiden Sukarno berkuasa merupakan bagian dari desukarnoisasi dalam lingkaran struktural. Hal ini juga dialami

18 Wawancara dengan Anak Agung Istri Ngurah Sutedja tahun 2002.

19 Wawancara dengan Ibu Sutedja. Laporan tertulis atas penculikan A.A.B. Sutedja. Djakarta, 26 Djuli 1966. Arsip milik Puri Negara, Jembrana; dan "Misteri 35 tahun Hilangnya Gubernur Sutedja", *SKH Radar Bali* tanggal 3-11 September 2001.

oleh pejabat daerah yang dianggap atau dicurigai sangat dekat dengan Sukarno.

Kekuasaan dan Kekerasan

Pada tahun 1965, A.A.B. Sutedja di lingkaran kekuasaan dengan menyandang jabatan sebagai orang nomer satu di Bali telah mengundang berbagai spekulasi arah politiknya, baik dari kalangan awam maupun elite politik yang eksis pada waktu itu. Ada dugaan yang memandang peristiwa itu sebagai konspirasi politik dalam rangka desukarnoisasi seperti yang terjadi di pusat (Jakarta). Hal ini disandarkan pada sikap absolut yang digariskan dalam kebijakan Gubernur Sutedja berkiblat pada perintah Presiden Sukarno. Gubernur Sutedja terkenal dengan “orang kepercayaan” atau “anak emasnya” Sukarno. *Statement* yang berbahaya baginya pernah terlontar ketika mengatakan, “apa kata Bung Karno, begitu kata Saya” di hadapan para Bupati seluruh Bali yang sedang menghadap di rumah dinas Gubernur Bali (sekarang Jaya Sabha).²⁰ Pernyataan ini dipakai oleh orang-orang yang berseberangan dengan garis politik Sukarno digunakan sebagai alibi kuat untuk mengecap Sutedja adalah PKI atau setidaknya mendukung gerakan PKI. Padahal A.A.B. Sutedja lebih tepat dengan sebutan seorang Sukarno, karena bukti tertulis yang dikeluarkan Pepelrada Bali tidak mengindikasikan keterlibatan Sutedja dalam “G30-S/PKI”.²¹ Ada dua asumsi mengapa Sutedja dilenyapkan. Pertama, bahwa Gubernur Sutedja secara faktual diculik Jakarta oleh orang-orang atau oknum-oknum yang berseragam dan menggunakan fasilitas militer. Peran militer dapat dikaitkan dengan peran RPKAD dalam operasi militer untuk mengendalikan keamanan di Bali. Kedua, Barisan sakit

20 Bupati Buleleng Ida Bagus Mahadewa memprakarsai pertemuan dengan para Bupati se-Bali di kantor Bupati Badung sebelum menghadap Gubernur Sutedja untuk mengklarifikasi kesimpangsiuran berita dan kondisi di Jakarta setelah terjadinya pembunuhan para jendral, lihat I.B. Jelantik dan Arya Suarja (ed.). *Ida Bagus Dosther 80th*. (Denpasar: Manawa Bali, 2007), hlm. 136-137.

21 Surat Keterangan No. 351/1372/DPRD, tentang ketidakterlibatan A.A.B. Sutedja dalam G.30.S PKI. Tanggal 1 September 1989. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.

hati yang belum menerima penunjukkan A.A.B. Sutedja sebagai Gubernur dalam pemilihan Gubernur Bali yang pertama. Kubu Mantik yang kalah atau tidak dipilih Presiden Sukarno menjadi gubernur kemungkinan masih menyimpan dendam dan tidak terima atas kekalahan pada saat pemilihan gubernur yang dimenangkan A.A.B. Sutedja. Pasca-Oktober 1965, kubu Mantik yang bersinergi dengan militer (RPKAD) untuk mengorganisir milisi *Tameng* guna membunuh para anggota dan simpatisan PKI di Bali. Kubu Mantik didukung oleh PNI mainstream di Bali yang kebanyakan konservatif dan berasal dari kalangan ningrat atau 'ksatria' serta kaum Islam di Bali yang sebagian besar berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU) (Darmayana 2013; Wirawan 2009).

Hilangnya Gubernur Sutedja yang diculik oknum militer menyisakan berbagai tanda tanya dan hingga kini masih misterius. Pengertian orang hilang yang paling sederhana adalah seseorang yang keberadaannya di luar kemauan dan kemampuannya, dan besar kemungkinan terlanggari haknya untuk hidup. Kasus orang hilang sudah semestinya menjadi tanggung jawab negara karena rasa aman dan kebebasannya terlucuti. Masalahnya menjadi bertele-tele jika yang menyebabkan hilangnya seseorang dilakukan oleh aparat negara (militer), seperti kasus Gubernur Sutedja. Penanganannya tidak pernah serius, dan hal ini diikuti dengan kasus-kasus orang hilang yang lainnya yang melibatkan oknum militer pada akhir era Orde Baru. Penegakan hukum memang masih sebatas wacana, dengan kata lain jalan masih panjang untuk taraf mewujudkan supremasi hukum.

Penculikan dan tindak kekerasan kolektif yang mengarah pada pembunuhan terutama yang terjadi di Bali dapat dijelaskan dengan dua metafora, yakni pertama, metafora alamiah, dimana kekerasan diasumsikan sepadan dengan letusan vulkanik yang destruktif. Oleh karena itu, tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Kedua, metafora mengenai keseimbangan, artinya kekerasan yang menyebabkan orang kehilangan hak hidup itu terjadi karena kebudayaan mengalami ketidakseimbangan dan pembunuhan (pengorbanan) tersebut perlu dilakukan demi

menegakkan kembali keseimbangan itu.²² Jadi, kedua metafora itu menggambarkan kekerasan sebagai suatu proses tak terelakkan dan otonom. Menurut Eklof, penjelasan peristiwa pembantain di Bali yang dikaitkan dengan niskala merupakan penjelasan yang bersifat emic tentang apa yang terjadi, bukan penjelasan yang membawa nilai penjelasan ilmiah apapun (Eklof 2003:205).

Penculikan atau orang hilang telah mewarnai sejarah politik bangsa Indonesia sejak republik ini didirikan hingga zaman Reformasi. Peristiwa Rengasdengklok tahun 1945, Peristiwa Madiun 1948, Tragedi 30 September '65, operasi DOM di Aceh dan penculikan-penculikan menjelang runtuhnya rezim Suharto merupakan rangkaian peristiwa tindak kekerasan yang menghiasi sejarah Indonesia. Bukan hal yang aneh lagi dalam keadaan *chaos* terjadi penghilangan orang atau tokoh dari pihak yang berseberangan. Gubernur Bali Sutedja yang hilang pada tahun 1966 adalah salah satu dari sekian ratus (bahkan ribuan) orang Bali yang dihilangkan secara paksa (diculik kemudian dibunuh) atau mengalami dehumanisasi tanpa pernah mendapat kejelasan dan negara alpa dalam penanganan ini. Terhadap kasus A.A.B. Sutedja, negara atau pemerintah tidak pernah menanggapi dengan serius. Segala upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menemukan keberadaan A.A.B. Sutedja sebagai kepala keluarga, namun tidak didukung oleh pemerintah. Bahkan jika dikaitkan dengan jabatan A.A.B. Sutedja sebagai mantan Gubernur Bali tersebut pemerintah juga tidak memberikan perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan.²³

22 Rod Aya, *Rethinking Revolution and Colltive Violence. Studies on Concept, Theory, and Method* (Amterdam: Het Spinhuis, 1990) dikutip dalam Henk Schulte Nordholt, *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas Sejarah Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 17.

23 Pengakuan anak A.A.B. Sutedja dalam sebuah wawancara penulis dengan A.A.G.A Beny Sutedja di Perumahan Pertamina Jakarta pada akhir tahun 2004, perihal fakta bahwa penghilangan nyawa Gubernur Bali pertama (ayahnya) tahun 1966 di Jakarta, phak yang bertanggung jawab dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk membayar hak kepada ahli waris Gubernur Anak Agung Bagus Sutedja, berupa gaji dan uang pensiun hingga saat ini.

Penutup

Sejarah tidak hanya mematri nama orang-orang besar dan para pahlawan, namun seharusnya juga setidaknya-tidaknya “bertugas” mencatat terhadap orang hilang, baik yang berasal dari publik figur maupun orang kebanyakan. Akan tetapi, penulisan sejarah Indonesia masih terkooptasi oleh kebijakan penguasa dengan mengatasmamakan persatuan dan kesatuan.

Bali adalah surga yang diciptakan (Vickers 2012). Oleh karena itu, penulisan sejarah Bali belum semua bebas diungkapkan karena faktor pencitraan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata atau surga para pelancong yang menghendaki kisah damai dan menentramkan agar tidak merisaukan para wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

Kisah hilangnya Gubernur Bali yang pertama, yakni A.A.B. Sutedja merupakan contoh nyata bahwa sejarah Bali masih menyimpan misteri. Sutedja yang meniti karier sebagai punggawa (distrik) daerah di Jembrana kemudian bergabung dengan pejuang untuk mempertahankan Kemerdekaan RI dan pada puncak karier politiknya menjabat sebagai Gubernur Bali tahun 1959.

A.A.B. Sutedja sebagai gubernur merupakan pendukung setia kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno. Ketika Presiden Sukarno mendapat dukungan dari kelompok kiri atau PKI yang tergabung dalam Nasakom sehingga kebijakan-kebijakannya terkesan kekiri-kirian, seperti implementasi *landreform*. Hal ini juga dilakukan Gubernur Sutedja dan konsekuensinya beberapa kebijakan yang diputuskan seolah-olah mendukung PKI. Terlepas apapun kebijakannya pada masa-masa akhir tugas sebagai gubernur, tetapi perjalanan sejarah politik di Bali tidak bisa menghapus begitu saja eksistensi A.A.B. Sutedja atau hanya samar-samar menyebut namanya dalam sejarah Bali periode 1945-1965. Dapat dipahami bahwa sedikit sekali orang Bali yang ingin mengorek kembali tragedi '65 dalam perbincangan meski untuk tujuan rekonsiliasi.²⁴ Kebanyakan dari sebagian besar dari

24 Setelah Reformasi, secara perlahan mulai muncul keberanian untuk mengungkap kembali peristiwa tragedi '65 dari sudut pandang korban. Hal ini dapat ditengarai dari la-

mereka yang dapat meloloskan diri dari “lubang jarum” tragedi ‘65, lebih memilih menyimpannya dalam album memori mereka. Bagaimanapun juga, Sejarah tetap berhak untuk memberi ruang kepada siapa pun sesuai dengan kapasitas dan porsinya di pentas sejarah, sebab hasil dari rekonstruksi suatu peristiwa harus dikembalikan kepada masyarakat untuk menilainya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Laporan tertulis atas penculikan A.A.B. Sutedja. Djakarta, 26 Djuli 1966. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.
- Koetipan Beslit Radja Djembrana No. 22/1946. tentang pengangkatan Anak Agoeng Bagoes Soetedja sebagai punggawa Mendoyo, tanggal 24 Mei 1946. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.
- Memo Sekretariat Negara Kabinet Presiden. Mengenai Pemanggilan Gubernur Sutedja ke Jakarta. Tanggal 3 Desember 1965. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.
- Notulen Pertemuan dengan Presiden Sukarno tanggal 10 Desember 1965 di Jakarta. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.
- Petikan Keputusan Presiden RI No. 380/1965, tentang penugasan sementara A.A.B. Sutedja ke Jakarta, tanggal 18 Desember 1965. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.
- Surat Keputusan Peperada No.: KEP-PPD.2/1/234 tentang pembekuan sementara PKI dan ormas-ormasnya dan pelimpahan pelaksanaan kepada Pangdam XV Bali. Tanggal 3 November 1965. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.
- Surat Keterangan No. 351/1372/DPRD, tentang ketidakterlibatan A.A.B. Sutedja dalam G.30.S PKI. Tanggal 1 September 1989. Arsip milik Puri Negara, Jembrana.

Buku

- Ardhana, I Ketut dan A.A. Bagus Wirawan, 2012. “Neraka Dunia di Pulau Dewata,” dalam Taufik Abdullah, Sukri Abdurrachman, dan Restu Gunawan. *Malam bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik lokal*. Jakarta: Yayasan Obor.
- A. Hanna, Willard. 1990. *Bali Profil: People, Event, Circumstance (1001-1976)*. Mollucas: Banda Naira.
- Cribb, Robert (ed.). 2003. *The Indonesian Killing: Pembantaian PKI di Jawa*

himya, lembaga penelitian, berbagai macam penelitian yang dilakukan dengan mengambil tema seputar peristiwa 1965, penerbitan buku, serta film dokumenter.

- dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata bangsa.
- Dake, Antonie C.A. 2006. *Sukarno File: Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Darma Putra, I N. 2008. *Bali dalam Kuasa Politik*. Denpasar: Buku Arti.
- Darma Putra, I Nyoman. 2011. "Mulai berbentuk; Budaya dan nasionalisme di Bali 1959-1965," dalam Jennifer Lindsay dan Maya T. Liem (ed.). *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965*. Denpasar: Pustaka Larasan, KITLV-Jakarta.
- Eklof, Stefan. 2003. "Pembunuhan –Pembunuhan di bali 1965-1966: pendekatan Historis dan Budaya," dalam Frans Husken dan Huub de Jonge (ed.). *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1989*. Yogyakarta: LkiS.
- Jelantik, I.B. dan Arya Suarja (ed.). 2007. *Ida Bagus Dosther 80th*. Denpasar: Manawa Bali.
- P. Lim Pui Huen, James H. Morrison dan Kwa Chong Guan (eds.). 2000. *Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode*. Jakarta: LP3ES.
- Robinson, Geoffrey. *The Dark Side of Paradise: Political Violent in Bali*. Itacha and London: Cornell University Press, 1995.
- Hermawan Sulisty, 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*, Jakarta: Gramedia.
- Manafe, Aco. 2007. *Ide Anak Agung Gde Agung: Keunggulan Diplomasinya Membela Republik*. Jakarta: Inti Lipo Indah.
- Nordholt, Henk Schulte. 2002. *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nordholt, Henk Schulte. 2009. *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV Jakarta.
- Setiawan, Hersri. 2003. *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galang Press.
- Soe Hok Gie. 1999. *Zaman Peralihan*. Yogyakarta: Bentang.
- Suryawan, I Ngurah. 2005. *Jejak-jejak Manusia Merah: Siasat Politik Kebudayaan Bali*. Yogyakarta: Buku Baik.
- Suryawan, I Ngurah. 2007. *Ladang hitam di Pulau Dewa: pembantaian massal 1965 di Bali*. Yogyakarta: Galangpress.
- Taufik Abdullah, Aswab Mahasin dan Daniel Dakidae (eds.). 1981. *Manusia Dalam Kemulut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Trisila, Slamet. 2003. *Dewa Ngurah Jenawi: Pendidikan dan Pela-*

jaran," dalam H. Sasongko dan M. Budianta (ed.), *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965*. Jakarta: Yayasan Lontar.

Vickers, Adrian. *Bali: A Paradise Created*. Singapore: Periplus, 2012.

Makalah, Koran, Jurnal, dan Majalah

A.A.G.A. Sutedja, "Rekonsiliasi Terapan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Gubernur Bali Anak Agung Bagus Sutedja", Makalah Seminar Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Sejati, tanggal 15 April 2004 di Universitas Udayana Denpasar.

Darmayana, Hiski. "Anak Agung Bagus Sutedja, Korban Kebiadaban Politik Orde Baru," dimuat Minggu, 27 Januari 2013 pada: <http://www.berdikarionline.com/opini/20130127/anak-agung-bagus-sutedja-korban-kebiadaban-politik-orde-baru.html#ixzz2LHMVG86C>. Diakses 19-2-2013.

"Misteri 35 tahun Hilangnya Gubernur Sutedja", *SKH Radar Bali* tanggal 3-11 September 2001.

Santikarma, Degung. 2000. "Kisah Bali dengan Keakraban dalam Kekerasan", *Kompas*, Jumat 1 September.

"Sarwo Edhie dan Penculikan Gubernur Bali," *Sinar Harapan*, 18 November 2013.

"Setelah Ayah Dijemput Orang Berseragam", *D&R*, No. 24/XXIX/31 Januari. 1998

Tjong, Roy. 2002. "Budaya Kekerasan vs. Harmoni", dalam *Wacana*, edisi 9. tahun III. Yogyakarta: Insist.

Wirawan, Wahyu. 2009. Peran Militer dalam Gerakan Massa dan Pembunuhan Massal di Jawa-Bali, dalam *Jurnal Historia Vitae*. Vol. 23. No. 2. Oktober. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FKIP, Universitas Santa Dharma.

Film dan Internet

Kuntjara (sut.). 2005. *Kawan Tiba Senja: Bali Seputar '65*, Film Dokumenter produksi LPKP '65 Bali Bekerjasama dengan JK6 Bali.

Daftar Narasumber

Anak Agung Gde Agung Beny Sutedja, Negara-Denpasar.

Anak Agung Gde Putra Agung, mantan dosen Unud, Denpasar.

Ida Bagus Sidemen, mantan dosen Unud dan Aktivist PNI, Denpasar.

Ida Bagus Sutha, Mantan anggota PSI, Gianyar.

Nengah Seria, Mantan pegawai bea cukai. Denpasar.